

REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGATASI INDONESIA KELUAR DARI KRISIS MULTIDIMENSIONAL

Oleh:
Ir. Budi Setiawan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Abad 21 kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan krusial yang sangat rumit dan penuh ketidakpastian, hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan privatisasi, otonomi daerah dan globalisasi yang sedang berlangsung. Belajar dari berbagai pengalaman beberapa negara maju yang telah sukses dalam menghadapi permasalahan di bidang ekonomi, politik, gejolak sosial, demokratisasi, HAM dan lain sebagainya, ternyata kunci keberhasilannya terletak pada keunggulan kompetensi Sumber Daya Manusianya. Kunci sukses yang lainnya adalah dengan melengkapai kompetensi SDM melalui keunggulan sistem kelembagaan (perilaku konsisten, kelaikan kebijakan, kepastian hukum dan aturan main), penguasaan IPTEK, serta kualitas organisasi dan manajemen secara baik pada sektor publik dan sektor bisnis. Dari berbagai permasalahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, maka tidak dapat kita sangkal lagi bahwa keunggulan daya saing dari suatu negara akan sangat menentukan keberhasilan negara tersebut dalam menghadapi krisis perekonomian pada saat ini.

Pendahuluan

Lebih dari tiga tahun negara kita dihadapkan pada krisis multidimensional yang sangat memukul perekonomian nasional khususnya di sektor riil, dan merupakan hajat hidup masyarakat baik untuk level menengah maupun bawah. Saat ini kita masih sulit untuk mencoba berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dan terus menerus membebani kita semua dalam upaya menggerakkan perekonomian nasional. Negara-negara lain seperti Korea Selatan, Thailand, Filipina dan Malaysia mengalami kondisi yang

hampir sama dengan kita, namun kondisi yang ada saat ini telah mulai berangsur pulih serta berusaha kembali bangkit untuk menjadi negara yang dapat bersaing dengan negara lain di bidang perekonomian. Berbagai kebijakan politik yang telah dilakukan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan serta tanda-tanda mengarah pada perbaikan (pemulihan ekonomi). Teori ekonomi konvensional yang masih berlaku saat ini, masih mempunyai keterbatasan khususnya untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara kebijakan dan "perilaku" politik secara umum yang diharapkan akan memberikan kontribusi

terhadap perkembangan perekonomian negara. Itulah nampaknya yang melatarbelakangi Paul Ormerod untuk menulis buku yang berjudul "The Death of Economics" (Matinya Ilmu Ekonomi). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa masih terlalu banyak simplifikasi atau penyederhanaan dalam bentuk model dari teori ekonomi yang semestinya masih dapat dijalankan, namun untuk dekade sekarang ini dari berbagai kaidah/teori ekonomi yang ada telah banyak yang dilanggar. Asumsi (*ceteris paribus*) yang sering mewarnai kaidah-kaidah dibidang ekonomi, sangat sulit untuk diimplementasikan. Krisis yang terjadi di negara kita belakangan ini, dengan indikasi tidak manjurnya berbagai ramuan ekonomi dalam mengobati krisis tersebut, menunjukkan sulitnya permasalahan ekonomi saat ini untuk dilepaskan dari berbagai aspek-aspek lainnya seperti aspek politik, sosial, budaya, dan faktor yang kelihatan paling dominan saat ini adalah kepercayaan masyarakat pada pemerintahannya.

Ilustrasi mengenai lemahnya kemampuan prediksi dari ilmu ekonomi ini, dapat digambarkan antara lain pada saat terjadinya perselisihan antara lembaga legislatif (DPR) dengan eksekutif (Presiden) yaitu tatkala DPR mengeluarkan Memorandum I dan II pada bulan Februari dan Bulan Mei tahun 2001, kedudukan rupiah di pasar uang langsung merespon negatif (anjlok), indeks harga saham pun di bursa efek mengalami tekanan. Pertanyaan yang muncul, berapa besarkah pengaruh dari Memorandum I dan II terhadap bergejolaknya nilai tukar rupiah? bagaimana mengukurnya? adakah variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhinya?

Atau dalam kondisi lain pada saat MPR melakukan voting (pemungutan suara) untuk memilih Presiden, antara Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, diberitakan bahwa tatkala suara Mega menggungguli Gus Dur nilai rupiah dan harga saham menguat tajam. Namun ketika Gus Dur yang terpilih, rupiah dan saham pun justru melemah kembali. Pertanyaannya, berapa besar pengaruh keunggulan suara Megawati atau Gus Dur terhadap kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika? bagaimana mengukurnya secara pasti? adakah faktor-faktor lain yang ikut memberikan kontribusi terhadap kenaikan/penurunan rupiah dan nilai saham?

Demikian juga, para pengamat ekonomi dan politik saat ini mengatakan bahwa beberapa kebijakan pemerintah saat ini (Baca: Gus Dur) lebih banyak membuat orang kebingungan, yang dampaknya menimbulkan sentimen negatif terhadap pasar uang dan pasar komoditas lainnya. Yang paling nyata kelihatan adalah fluktuasi nilai tukar rupiah dibandingkan dengan mata uang asing semakin sulit untuk dikendalikan, inflansi yang naik turun sukar untuk diprediksi, jumlah pengangguran melalui pemutusan hubungan kerja semakin tinggi, sejumlah Bank milik pemerintah maupun swasta masih terus terbelenggu dengan kredit macet bermasalah (*Non Performance Loan*) dan berbagai indikator pertumbuhan ekonomi lainnya semakin sulit diramalkan, kemana model-model teoritis dibidang ekonomi dapat diarahkan dalam mengatasi permasalahan tersebut?

Sebenarnya upaya-upaya perbaikan dibidang perekonomian negara telah banyak

dilakukan oleh pemerintah seperti yang terakhir ini adalah 10 (sepuluh) program pemulihan ekonomi yang disosialisasikan oleh Rizal Ramli pada bulan Oktober tahun 2000 lalu telah memberikan angin segar bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional. Bila kita cermati pada program yang kelima dari 10 program tersebut yaitu “mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan Investasi (*equity based recovery*) ketimbang pemulihan ekonomi berlandaskan pinjaman (*loan based recovery*)”, hal ini sudah kelihatan adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi makro yaitu kita akan lebih menekankan pada Investasi (PMA) ketimbang bersandar pada pinjaman luar negeri. Namun instrumen ini tentunya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak yang ikut menentukan policy dibidang perekonomian seperti keterlibatan secara intensif dari Bank Indonesia (kebijakan moneter), Menperindag (kebijakan dalam bentuk kemudahan melakukan investasi), Menteri Keuangan (kebijakan di bidang fiskal), Menkopolsoskam (kebijakan dalam bentuk stabilitas keamanan negara) dan yang lebih penting lagi adalah “political will” dari orang nomor satu di negara kita tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Apabila kita menyimak pula apa yang dikemukakan oleh Soeharsono Sagir dalam kerangka makro program pemulihan ekonomi nasional, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolok ukur (indikator) dalam upaya menghadapi krisis multidimensional ini seperti misalnya:

1. *Pertumbuhan Ekonomi*, hal ini diindikasikan melalui; pertumbuhan antar sektor yang lebih merata (tidak timpang), alokasi kredit antar kelompok usaha yang lebih berimbang, investasi PMDN dan PMA antar daerah yang lebih berimbang serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam mendukung PAD.
2. *Kesempatan Kerja*, hal ini harus diikuti dengan; pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi positif dengan kesempatan kerja, memperluas kesempatan kerja padat karya produktif, dan pembangunan desa terpadu.
3. *Perkembangan Harga dan Nilai Tukar*, ini harus didukung melalui; kebijakan moneter – kredit selektif, hindarkan *demand pull inflation*, hindarkan *cost pull inflation* dari dampak kenaikan harga BBM dan tarif lainnya, cadangan devisa harus bersumber pada surplus neraca berjalan, serta pemantauan lalu lintas devisa oleh Bank Sentral dilakukan dengan ketat.
4. *Neraca Pembayaran*, ini dilakukan dengan cara; menggalakkan ekspor komoditas non migas ber-*import content* rendah, dan menekan defisit neraca jasa dan menaikkan surplus neraca barang.
5. *Utang Luar Negeri*, upaya yang harus dilakukan adalah; pengendalian utang luar negeri, pemanfaatan utang yang efisien dan efektif, serta hindarkan *debt criminal – waste*.
6. *Lembaga Keuangan Perbankan*, upaya yang harus dikerjakan adalah; dengan melakukan kebijaksanaan *Prudent Bank*

ing System – CAMEL, serta Bank Indonesia harus berfungsi sebagai Bank Sentral tanpa adanya intervensi dari pemerintah (independensi bank sentral), seperti saat ini adanya rencana untuk melakukan revisi APBN 2000 karena defisit anggaran yang semakin besar akibat terpuruknya nilai tukar mata uang rupiah, maka untuk mengatasinya Bank Indonesia jangan sampai melakukan pencetakan uang seperti kejadian masa lalu.

Dari enam program kerangka pemulihan ekonomi ini, tentunya harus kita uji keampuannya melalui implementasi jangka pendek dan jangka panjang yang “full” serius dan mesti dijaga dan dilakukan monitoring oleh berbagai pihak. Walaupun dalam perjalanan perekonomian negara sekarang ini, mau tidak mau suka ataupun tidak suka kita sudah mendapat “perwalian” dari IMF dalam bentuk Letter of Intent (LoI). Kondisi seperti ini tentunya akan menjadi “handicap” terhadap kemandirian negara dalam menjalankan roda perekonomian dan dengan adanya LoI ini akan sangat menyulitkan kita untuk dapat mengelak dan menghindarinya.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mencoba melihat berbagai paradigma baru di bidang manajemen yang terkait langsung dengan perbaikan dari kebijakan pemerintah yang telah berlangsung saat ini. Paradigma baru yang akan dimunculkan disini antara lain dalam hal kompetensi, daya saing dan kesejahteraan yang dikemukakan oleh beberapa pakar di bidang Ekonomi dan Manajemen seperti; Porter (*The Competitive*

Advantage of A Nations), Drucker (*Knowledge Based Economy*), Kotler (*Strategic Approach to Building Nations Wealth*), serta UI Haque (*Trade, Technology and International Competitiveness*). Dari keempat pakar ekonomi dan manajemen ini perlu untuk kita pelajari bersama khususnya dalam mengembangkan berbagai model pendekatan ekonomi dan manajemen. Keuntungan yang dapat kita manfaatkan dari teori-teori yang dikemukakan mereka adalah bagaimana melihat kemungkinan untuk mengeluarkan bangsa ini dari krisis multidimensional yang telah memaksa kita bekerja keras untuk mengatasi kegiatan perekonomian nasional yang tidak berjalan lancar, kehilangan mata pencaharian sebagian masyarakat melalui pemutusan hubungan kerja, isu otonomi daerah, dan berbagai isu-isu lain seperti desintegrasi bangsa yang semakin marak di berbagai daerah.

Paradigma Baru: “Kompetensi, Daya Saing Dan Kesejahteraan”

Dengan mengantisipasi berbagai isu-isu aktual yang ada saat ini dan kita pandang sangat strategis dalam menyongsong tantangan masa depan yang sulit diantisipasi serta sering kita menghadapi gejala: “yang pasti adalah ketidakpastian, yang tetap/konstan adalah perubahan begitu cepat dan tidak terduga” hingga semua langkah kebijaksanaan ekonomi seperti: Fiskal/APBN maupun moneter, selalu harus disertai asumsi (*ceteris paribus*) ditambah dengan catatan tidak “melanggar” atau bertentangan dengan petunjuk *Letter of Intent* IMF.

Mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka kita harus mengamati pula berbagai perubahan melalui "Paradigma Baru" yang sekarang sedang berkembang dibidang manajemen startegis yaitu dengan mengingatkan kita pada pentingnya "kompetensi, daya saing dan kesejahteraan". Paradigma baru dalam menghadapi tantangan masa depan yang penuh dengan "turbulensi" (kondisi yang berubah-ubah — penuh ketidakpastian), maka dapat kita identifikasikan melalui berbagai fenomena-fenomena yang ada seperti berikut ini:

1. Perubahan Teknologi, kemajuan dibidang teknologi sistem informasi melalui penggunaan alat bantu komputer sangat berpengaruh terhadap perkembangan komunikasi dan telekomunikasi sehingga jangkauan informasi dapat mencapai berbagai pelosok penjuru dunia dan bergerak dengan cepat.
2. Kualitas (Standard), munculnya berbagai standar produksi yang diakui secara internasional melalui ISO tentunya akan memunculkan kompetisi baru diberbagai sektor baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh setiap negara.
3. Globalisasi, batas-batas negara atau wilayah akan semakin sulit untuk ditetapkan/dikondisikan akibat perkembangan pengaruh globalisasi ini.
4. Demokrasi dan Hak-Hak Azasi Manusia, penegakan kedua aspek ini menjadi isu internasional dan merupakan bukti bahwa suatu negara telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pelaksanaan kedua aspek tersebut
5. Lingkungan Hidup, penebangan hutan, pembuangan limbah industri, polusi akibat

gas buang dari kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan merupakan isu-isu sentral saat ini.

6. Perlindungan Konsumen, perlindungan yang diberikan kepada para konsumen diharapkan agar pihak produsen tidak semena-mena mengeluarkan produk-produknya yang sesungguhnya akan berakibat pada kerugian di pihak konsumen.
7. Otonomi Daerah, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 (Otonomi Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah telah memunculkan semangat baru di daerah-daerah, namun inipun telah dijadikan komoditas praktis oleh setiap daerah untuk berlomba-lomba meningkatkan kreativitasnya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kami akan mencoba untuk mengkaji apa yang dikemukakan salah seorang pakar dibidang ekonomi dan manajemen yaitu UI Haque dalam bukunya "*Trade, Technology and International Competitiveness*", menyatakan bahwa Daya Saing yang telah dirinci dalam bentuk pertumbuhan, produktivitas dan inovasi, ketiganya ini akan bertumpu pada tiga titik sentral yaitu pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan teknologi.

Berdasarkan laporan tahunan terakhir untuk peringkat daya saing sejumlah negara utama di dunia, telah diterbitkan oleh International Institut for Management Development (IMD), Lausanne, Swiss pada tanggal 26 April 2001. Dari laporan tersebut Indonesia mengalami penurunan peringkat dan saat ini berada pada posisi yang paling rendah dengan skor 28,26 dari 49 negara yang diteliti dibawah

Kolumbia, Polandia dan Venezuela. Pada kelompok peringkat mengenai efisiensi pemerintahan, Indonesia berada pada peringkat ke-45 (yang mencakup penilaian aspek keuangan publik, kebijakan fiskal dan pendidikan). Sedangkan untuk kelompok pertumbuhan ekonomi kita berada pada urutan ke-46 dan perekonomian domestik ada pada peringkat ke-44 (mencakup perdagangan internasional, investasi asing, dan tenaga kerja, peringkat efisiensi bisnis pada urutan ke-48 (mencakup produktivitas, pasar tenaga kerja, sedangkan untuk pasar uang dan dampak globalisasi). Untuk kelompok infrastruktur, posisi Indonesia berada pada peringkat ke-49 (mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur sains, kesehatan dan lingkungan). Negara-negara yang menduduki peringkat paling tinggi daya saingnya terdiri dari Amerika Serikat (skor 100), Singapura (skor 87,66), Finlandia (skor 83,38), Luksemburg (skor 82,81) dan Belanda (skor 81,46). Peringkat daya saing tersebut telah disusun berdasarkan analisa tentang bagaimana kemampuan setiap negara mengembangkan diri sebagai tempat yang memberikan daya saing kepada beberapa jenis usaha. Faktor yang menjadi pendukung dalam penilaian daya saing ini adalah gambaran tentang industri dan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara.

Dengan mengamati kondisi terakhir tersebut, maka akan terlihat gambaran bahwa kondisi negara kita ini benar-benar sedang terpuruk, dan sebagian politisi dan praktisi di berbagai bidang telah menilai bahwa kondisi bangsa saat ini sudah berada pada posisi diujung jurang kehancuran. Dan jika kita mengamati pula beberapa indikator ekonomi makro Indo-

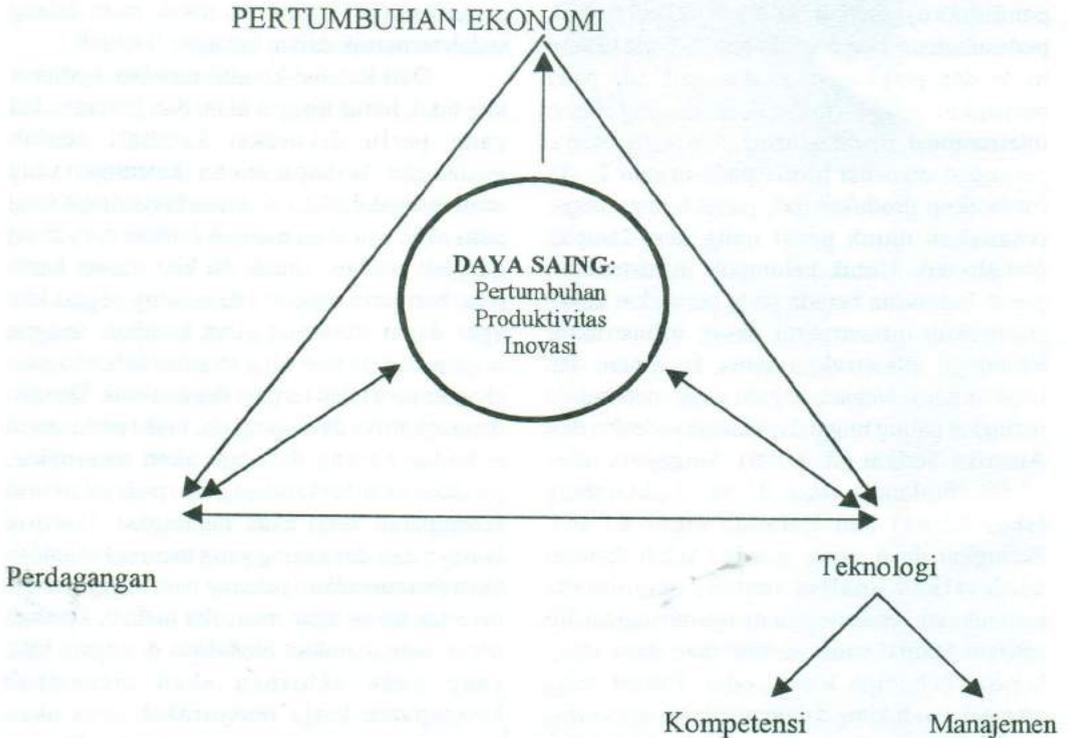
nesia khususnya dalam menganalisis rasio perbandingan antara Debt Service (milyar USD) dengan Eksport (milyar USD) untuk tahun 2000 ini yaitu sebesar 44,03 %, maka dengan demikian dapat diprediksikan untuk beberapa perusahaan di negara kita untuk masa datang sudah termasuk dalam katagori "Default".

Dari kondisi-kondisi tersebut, tentunya kita tidak harus tinggal diam dan beberapa hal yang perlu dikoreksi kembali adalah memangkas berbagai aturan (ketentuan) yang akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan mengakibatkan daya saing menjadi rendah. Untuk itu kita semua harus terus berupaya memacu daya saing negara kita agar dapat sejajarkan kembali dengan negara-negara lain yang struktur kelembagaan ekonominya telah terpola dengan baik. Dengan meningkatnya daya saing ini, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat, produksi akan berkembang, dan pada gilirannya kesempatan kerja akan meningkat. Dampak lainnya dari daya saing yang meningkat adalah akan memunculkan peluang baru bagi investor-investor asing agar mencoba melirik kembali untuk menanamkan modalnya di negara kita, yang pada akhirnya akan menambah kesempatan kerja masyarakat serta akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka roda perekonomian negara akan segera beranjak dan bergerak setapak demi setapak untuk memacu sektor riil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dari gambaran yang diberikan oleh pakar ekonomi dan manajemen khususnya Ul Haque, kita akan melihat lebih jelas lagi bahwa adanya peningkatan daya saing ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan yang

kelas akan menetes pada sektor perdagangan dan teknologi (yang akan mencakup kompetensi dan manajemen perdagangan). Untuk lebih jelasnya

melihat program peningkatan daya saing yang dikemukakan oleh UI Haque ini, maka akan dapat kita lihat dalam sajian bentuk gambar berikut ini:



Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan mencoba menyimak paradigma baru yang ada di bidang ekonomi dan manajemen, maka dapat disimpulkan dan sekaligus merekomendasikan bahwa dalam mengatasi kesulitan yang ada untuk keluar dari krisis multidimensional yang sedang dihadapi

oleh negara kita, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Implementasikan program yang disosialisasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi khususnya pada program kelima yaitu: "mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan Investasi (*equity based recovery*) ketimbang pemulihan

- ekonomi berlandaskan pinjaman (*loan based recovery*)”, dengan demikian dalam kebijakan ekonomi makro kita akan lebih menekankan pada Investasi (PMA) ketimbang bersandar pada pinjaman luar negeri. Dengan catatan dukungan dari berbagai sektor yang berkaitan dengan penanaman modal asing seperti; stabilitas keamanan negara, perampangan birokrasi pemerintahan khususnya dalam hal perizinan untuk mendorong investasi lebih ditingkatkan kinerjanya dan “political will” pemerintah dalam menunjang keberhasilan program ini perlu diperhatikan.
2. Tingkatkan daya saing di negara kita melalui peningkatan Pertumbuhan (Growth), Produktivitas (to solve the existing problem) dan Inovasi (to solve the new problem). Dengan cara meningkatkan kualitas penelitian pada “Basic Research” yang dilakukan oleh Universitas dan “Komersialisasi” (Diffusion) oleh Perusahaan, sedangkan pemerintah dalam bentuk Research and Development (R&D) harus berperan aktif sebagai penghubung yang menjembatani antara Basic Research dan Komersialisasi.
 3. Dengan Inovasi yang merupakan “Creative Destruction” tentunya akan memunculkan kegiatan yang baru dan adanya kegiatan yang hilang, dari kondisi tersebut maka pada gilirannya akan memacu kemajuan teknologi di negara kita dan terakhir akan memunculkan (memacu) produktivitas.
 4. Dalam meningkatkan daya saing tentunya harus pula memperhatikan beberapa isu-isu strategis seperti; Perubahan Teknologi, Kualitas (standard), Globalisasi, Hak Azasi Manusia (HAM) dan Faktor-faktor Lingkungan. Dengan demikian secara lengkap kita dapat mengantisipasi sejak dini (early warning) kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul sehingga resiko kerugian yang akan terjadi dapat diminimalisasi sekecil mungkin.

Daftar Pustaka

- Baban Sobandi, Jurnal Wacana Kinerja, Perwakilan LAN Jawa Barat, Volume 3, 1 Juni 2001.
- Harian Kompas, Bisnis dan Investasi, 8 Mei 2001
- Ormerod, Paul, *The Death of Economics*, 1997
- Samuelson and Nordhaus, *Economics*, Mc. Graw Hill, Sixteenth Edition, 1998
- Suharsono Sagir, Makalah Kuliah Tekno Ekonomi, ITB, Bandung, 2001
- UI Haque, “*Trade, Technology and International Competitiveness*”, 1999.